

Dipublikasikan Pada
Rubrik OPINI
SKH Kedaulatan Rakyat
10 Agustus 2012 hal 14

IRONI NEGERI TEMPE¹

Oleh: Sutaryono*

Sebuah ironi kembali terjadi, menyusul berbagai ironisme yang mengiringi perjalanan negeri- yang konon disebut negeri agraris ini. Langka dan mahal nya harga kedelai, seakan menyadarkan kita bersama bahwa betapa ketergantungan kita kepada bangsa asing sudah sedemikian memprihatinkan. Bagaimana tidak, pada mulanya persoalan beras, daging sapi, minyak goreng, sekarang kedelai- yang kesemuanya itu adalah komoditas pangan yang sangat penting bagi sebagian besar masyarakat kita. Keprihatinan ini terasa kembali ketika diberitakan, aksi unjuk rasa pelaku industri/perajin tempe, mensikapi melonjaknya harga kedelai. Aksi mogok produksi, *sweeping* tempe/tahu di pasar, pemusnahan tempe/tahu sebagai wujud protes atas meroketnya harga kedelai terjadi di berbagai wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan tempe dan ketersediaan kedelai kita mengarah pada kondisi krisis. Apabila ini dibiarkan, berarti membiarkan tempe menjadi barang mewah di negeri asal tempe ini.

Penyebab kelangkaan dan mahal nya harga kedelai pada dasarnya telah diketahui oleh pemerintah sejak lama. Dokumen "Rencana Aksi Pemantapan Ketahanan Pangan 2005-2010", menetapkan arah pengembangan dan sasaran lima komoditas pangan utama, yaitu mempertahankan swasembada padi berkelanjutan, serta mencapai swasembada untuk komoditas jagung (tahun 2007), kedelai (tahun 2015), gula (tahun 2009) dan daging sapi (tahun 2010). Dalam konteks ini, swasembada kedelai akan dicapai pada tahun 2015. Namun apa dikata, alih-alih swasembada, mengurangi impor saja adalah hal sulit, mengingat tidak adanya peningkatan produksi. Komoditas kedelai, tahun 2004 tercatat jumlah import-nya sebesar 64,86% dari kebutuhan, pada tahun 2008 justru meningkat menjadi 70%. Tahun ini, jumlah impor kedelai mencapai 1,7 juta ton/tahun, dari total kebutuhan sebesar 2.4 juta ton atau mencapai 70,83%. Besarnya ketergantungan kedelai dari negara lain inilah yang menjadikan melambungnya harga. Sementara ini, kebijakan pemerintah untuk mengatasi kebutuhan kedelai dilakukan dengan menghapuskan pajak bea masuk sampai akhir tahun. Tujuannya jelas, yakni mencukupi kebutuhan kedelai dan menstabilkan harganya melalui peningkatan impor. Bukankah kebijakan tersebut adalah kebijakan inkonsisten? Disatu sisi mencanangkan program swasembada, namun di sisi lain memperbanyak impor.

Tampaknya perlu strategi yang tepat bagi pemerintah untuk mengatasi gejala 'tempe', agar permasalahan ini tidak selalu berulang. Beberapa gagasan tentang upaya meningkatkan produksi kedelai dapat dilakukan dengan: (1)

¹ Dimuat SKH Kedaulatan Rakyat, 10 Agustus 2012

* Dr. Sutaryono, Dosen pada Sekolah Tinggi Pertanian Nasional (STPN) & Prodi Pembangunan Wilayah Fak. Geografi UGM. Deputi Direktur Matapena Institute Yogyakarta

memperluas ketersediaan lahan pertanian; (2) melindungi tanah-tanah pertanian produktif dari upaya-upaya alih fungsi; (3) meningkatkan akses petani terhadap lahan pertanian yang tersedia; (4) memperbaiki tata niaga kedelai dan produk pertanian lainnya; (5) memberikan insentif bagi petani yang mengembangkan budidaya kedelai. Gagasan-gagasan tersebut hanya dapat terealisasi apabila segenap komponen bangsa mempunyai visi yang sama terhadap ketahanan pangan, mengingat persoalan ketersediaan lahan pertanian merupakan persoalan krusial yang melibatkan *multistakeholders*. Barangkali inilah pentingnya menyuarakan kembali dan mendorong gagasan tentang Pembaruan Agraria.

Persoalan kedelai dan tempe hanyalah salah satu faktor pentingnya direalisasinya program pembaruan agraria. Pembaruan agraria adalah upaya penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria untuk menyelesaikan ketimpangan struktur dan distribusi penguasaan sumberdaya agraria termasuk di dalamnya adalah sumberdaya lahan/tanah. Pembaruan agraria tidak cukup diletakkan pada konteks keterbatasan akses masyarakat atas sumberdaya agraria tetapi lebih luas pada persoalan keberlanjutan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria untuk mencapai ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terbukanya akses masyarakat terhadap sumberdaya agraria sama sekali belum bisa menjamin terjadinya perubahan menuju kesejahteraan apabila kebijakan pembangunan tidak memberikan peluang bagi keberlangsungan usaha masyarakat atas sumberdaya agraria.

Kebijakan pemerintah tidak hanya dilakukan dengan pertimbangan parsial dan jangka pendek, sebagaimana menghapuskan bea impor kedelai. Tetapi lebih menekankan pada kebijakan yang bersifat holistik dan sistemik terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara ini, termasuk di dalamnya adalah ketahanan pangan, mengingat ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup- baik dalam jumlah maupun mutunya-, aman, merata, dan terjangkau. Termasuk juga di dalamnya adalah kedelai, yang merupakan bahan pokok tahu dan tempe- makanan khas orang Indonesia.